



RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

TAHUN 2021-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.60**



2021



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.60 Telp (031) 3975454 Fax (031) 3975454

Website : <http://www.gresikkab.go.id> email : diskominfo@gresikkab.go.id

G R E S I K 61121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

(1) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan**
- Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD**
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan**
- Bab V : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif**
- Bab VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**
- Bab VII : Penutup**

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

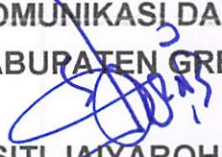
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 1 September 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**


Dr. SITI JAIYAROH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640924 198703 2 010

DAFTAR ISI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
GRESIK**

DAFTAR ISI	i
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II - GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK	7
2.1.Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	7
A. Rincian Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas.....	10
B. Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat	10
C. Rincian Tugas Dan Fungsi Bidang Statistik dan Informasi Publik.....	12
D. Rincian Tugas Dan Fungsi Bidang Teknologi dan Informatika.....	15
E. Rincian Tugas Dan Fungsi Bidang SPBE	18
F. Rincian Tugas Dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional	20
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika	20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	22
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik	23
BAB III - ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi.....	30
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	31

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

BAB IV - VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK	33
4.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik	33
4.2 Strategi Dan Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik.....	34
BAB V - RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN GRESIK	50
5.1 Rencana Program Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Gresik	50
BAB VI -INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	71
BAB VII - PENUTUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi, pandemi Covid-19 dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat khususnya di tahun 2021, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam di Indonesia dan dunia. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi data yang akurat. Selain itu perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu, serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Diskominfo mempunyai tugas

menangani urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor pengembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Gresik.

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Gresik dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik
2. Merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD
3. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Program selama 5 tahun.

Perencanaan daerah juga harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat tahunan, sehingga memiliki sinkronisasi dan harmonisasi yang tinggi. Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Gresik di samping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 meliputi :

1. Undang–undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
 18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang rencana pembangunan yang ingin dicapai lima tahun ke depan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah

Kabupaten Gresik yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah :

1. Membuat dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, sehingga menjadi terarah dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan**, berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan SKPD**, berisi Tugas, Fungsi dan struktur organisasi PD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
- Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**, berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, memuat tentang visi, misi, Tujuan dan Sasaran, strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif,**
berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,**
berisi Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupten Gresik.
- Bab VII Penutup.**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13) dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Statistik dan Informasi Publik
 - a. Seksi Statistik
 - b. Seksi Komunikasi Publik
 - c. Seksi Penyebarluasan Informasi
4. Bidang Teknologi dan Informatika
 - a. Seksi Infrastruktur
 - b. Seksi Integrasi Sistem
 - c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
5. Bidang SPBE
 - a. Seksi Aplikasi
 - b. Seksi Layanan SPBE
 - c. Seksi Tata Kelola SPBE
6. Kelompok Jabatan Fungsional

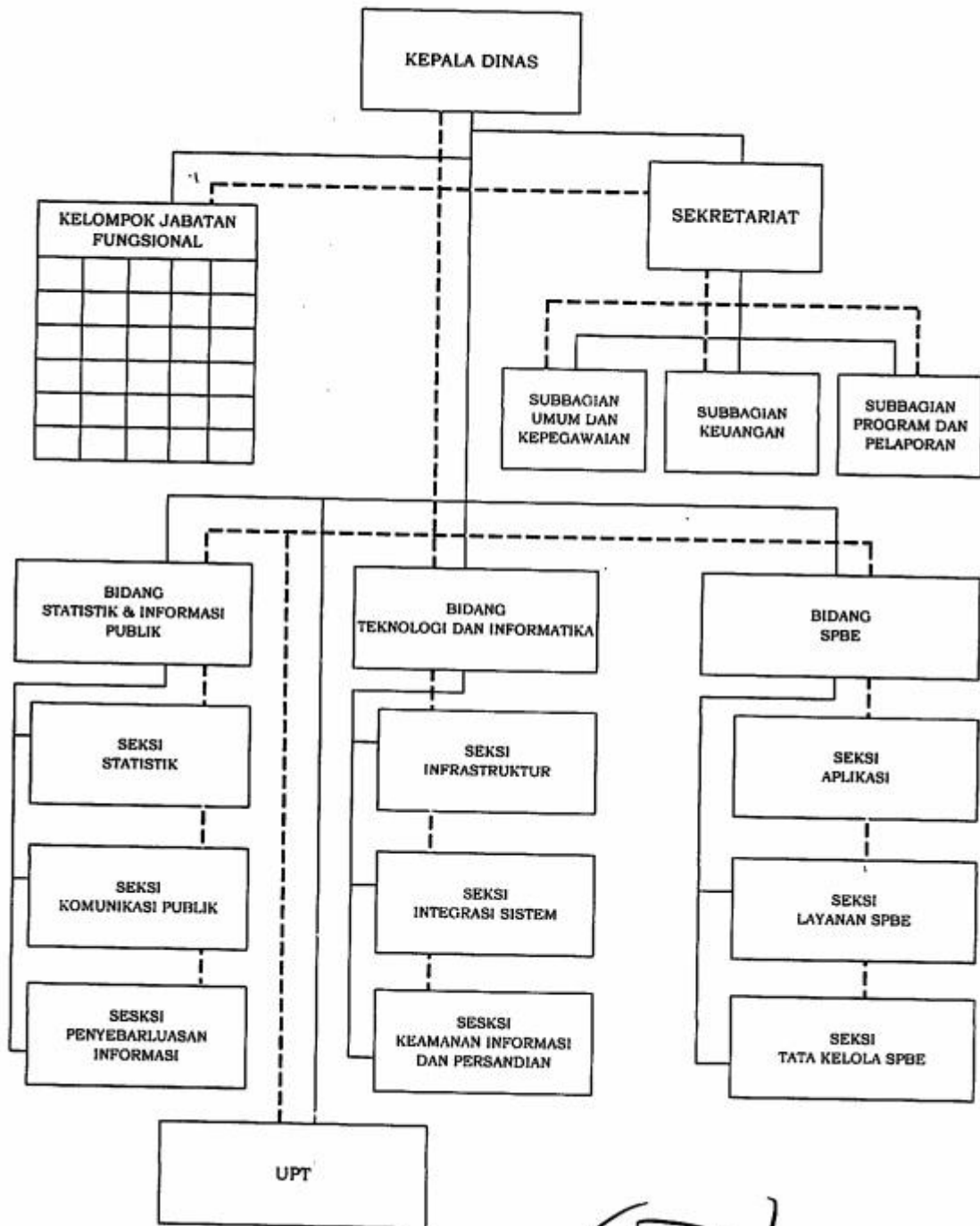
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh :

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program dan Pelaporan;
2. Bidang Statistik dan Informasi Publik yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Statisik, Seksi Komunikasi Publik dan Seksi Penyebarluasan Informasi;
3. Bidang Teknologi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Infrastruktur, Seksi Integrasi Sistem dan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
4. Bidang SPBE yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Aplikasi, Seksi Layanan SPBE dan Seksi Tata Kelola SPBE;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK



A. Rincian Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas kedinasan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dengan tata kerja sebagai berikut :

Tugas :

Kepala Dinas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat

Tugas :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;

- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Pelaporan

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
- c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;

- f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dinas komunikasi dan informatika;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Statistik dan Informasi Publik

Tugas :

Bidang Statistik dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang komunikasi dan informatika, sub bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program di bidang Statistik dan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan norma standard prosedur dan metode pelaksanaan program di bidang statistik dan informasi publik;

- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang statistik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Informasi Publik, terdiri dari:

- a. Seksi Statistik;
- b. Seksi Komunikasi Publik; dan
- c. Seksi Penyebarluasan Informasi.

Kepala Seksi Statistik, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Statistik;
- b. menyusun rumusan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang statistik;
- c. menyusun Standar Operasional dan Prosedur di bidang statistik;
- d. melakukan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyusun data statistik dasar;
- e. melaksanakan pengumpulan data dan informasi dari seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah;

- f. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip satu Data Indonesia;
- g. menyebarluaskan data dan meta data di portal Satu Data Indonesia;
- h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan statistik;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kebijakan teknis statistik; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Komunikasi Publik;
- b. menyusun rumusan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan komunikasi publik;
- c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan komunikasi publik;
- d. melaksanakan layanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik;
- e. melaksanakan layanan Pengaduan dan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD);
- f. melaksanakan pengelolaan konten dan media komunikasi publik;
- g. melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan (KIM), komunitas masyarakat, sekolah dan lainnya; dan
- h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kebijakan komunikasi publik;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis komunikasi publik; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyebarluasan Informasi;
- b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur serta Norma Standart Prosedur dan Kriteria di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. menyediakan informaispenyelenggaraan pemerintahan daerah;

- e. melaksanakan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi PPID;
- g. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi PPID;
- h. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan informasi dan dokumentasi PPID;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik sesuai bidang tugasnya.

D. Rincian Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi dan Informatika

Tugas :

Bidang Teknologi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub bidang informatika dan persandian.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Teknologi dan Informatika;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang teknologi dan informatika;
- c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, standard operasional dan prosedur, serta norma standard prosedur dan metode pengelolaan teknologi dan informatika;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang infrastruktur Teknologi dan Informatika, integrasi dan informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian;
- e. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi dan informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian;
- f. pelaksanaan pengendalian infrastruktur teknologi dan informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi, informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Komunikasi dan Persandian, terdiri dari:

- a. Seksi Infrastruktur;
- b. Seksi Integrasi Sistem; dan
- c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.

Kepala Seksi Infrastruktur, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur;
- b. menyusun bahan kebijakan pengembangan infrastruktur Teknologi Informatika;
- c. menyusun bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi;
- d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, standard operasional prosedur pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi milik Pemerintah Daerah;
- e. menyusun dan mengelola arsitektur infrastruktur teknologi informatika;
- f. mengelola dan memberikan layanan pusat data, sub domain, email, jaringan intra pemerintah, jaringan internet dan sistem penghubung layanan pemerintah;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan infrastruktur Teknologi Informasi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Informatika sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Integrasi Sistem, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Integrasi Sistem;
- b. menyusun bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan integrasi sistem teknologi dan informatika;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, standart operasional dan prosedur integrasi sistem teknologi dan informatika;

- d. menyusun dan mengelola arsitektur data dan informasi;
- e. melaksanakan layanan integrasi data;
- f. membangun dan mengelola data *warehouse* dan *big data*;
- g. membangun dan mengelola *dashboard* sistem pendukung keputusan;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan kebijakan integrasi sistem teknologi dan informatika; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Informatika sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. melakukan penyusunan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan keamanan informasi dan persandian;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan Standard Operasional Prosedur keamanan informasi dan persandian;
- d. menyusun dan mengelola arsitektur keamanan informasi;
- e. melaksanakan pengamanan data, infrastruktur dan aplikasi;
- f. melaksanakan layanan cadangan dan pemulihan (*Disaster Recovery Center*);
- g. melaksanakan fasilitasi layanan tanda tangan dan sertifikat *digital*;
- h. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian;
- i. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi keamanan informasi dan persandian;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keamanan informasi dan persandian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Informatika sesuai bidang tugasnya.

E. Rincian Tugas dan Fungsi Bidang SPBE

Tugas :

Bidang SPBE dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika sub bidang aplikasi dan SPBE.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program SPBE;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pengendalian pelaksanaan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan Standar Operasional dan Prosedur aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
- d. penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan dan pengelolaan aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan SPBE, terdiri dari:

- a. Seksi Aplikasi;
- b. Seksi Layanan SPBE; dan
- c. Seksi Tata Kelola SPBE.

Kepala Seksi Aplikasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Aplikasi ;
- b. melakukan penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan aplikasi;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional dan prosedur pembangunan dan pengelolaan aplikasi;
- d. menyusun dan mengelola arsitektur aplikasi;

- e. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan aplikasi umum dan khusus;
- f. melaksanakan integrasi aplikasi untuk mewujudkan *one stop window/single sign on*;
- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan aplikasi umum dan khusus;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan akuisisi pembangunan dan pengelolaan aplikasi umum dan khusus; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang SPBE sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Layanan SPBE, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Layanan SPBE;
- b. melakukan penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi layanan SPBE;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional dan prosedur layanan SPBE;
- d. melaksanakan layanan pengguna SPBE (ASN dan masyarakat);
- e. melaksanakan pengoperasian dan pengelolaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
- f. melaksanakan pengoperasian dan pengelolaan layanan publik berbasis elektronik;
- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi layanan SPBE;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan layanan SPBE; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang SPBE sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Tata Kelola SPBE, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola SPBE;
- b. melakukan penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Kelola SPBE;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur Tata Kelola SPBE;

- d. melaksanakan fasilitasi koordinator SPBE Pemerintah Daerah;
- e. menyusun kebijakan SPBE;
- f. menyusun dan melakukan reviu rencana induk SPBE;
- g. menyusun dan melakukan reviu rencana induk *Smart City*;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE dan *Smart City*;
- i. melaksanakan audit SPBE;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Tata Kelola SPBE; dan
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Kelola SPBE; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang SPBE sesuai bidang tugasnya.

F. Rincian Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik secara keseluruhan berjumlah 58 orang, terdiri dari :

- 23 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 3 orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- 32 orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL)

Tabel 2.1

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	Strata 3 (S3)	1
2	Strata 2 (S2)	8
3	Strata 1 (S1)	16
4	SMA	1
5	Tenaga Harian Lepas	32
Jumlah		58

Tabel 2.2.

Golongan Pangkat dan Golongan Pegawai

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1	Pembina Utama Muda	IV / c	1
2	Pembina Tk.1	IV/ b	1
3	Pembina	IV/ a	3
4	Penata Tk.1	III /d	13
5	Penata	III /c	0
6	Penata Muda Tk.1	III /b	0
7	Penata Muda	III /a	7
8	Pengatur Muda	II /a	1
9	Tenaga Harian Lepas	-	32
Jumlah			58

Untuk kelancaran proses kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik, maka diperlukan aset Pemerintah Daerah karena perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Barang Milik Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO. Urut	No. Akun	Uraian	Keadaan per tahun 2020		Keterangan
			Jumlah barang	Nilai (Rp.)	
		ASET TETAP			
1		Peralatan dan Mesin			
	0203	Alat Angkutan	6	1.018.900.239,98	
	0204	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
	0206	Alat Kantor & Rumah tangga	669	4.319.520.912,83	
	0207	Alat Studio dan Komunikasi	131	1.153.608.796,00	
2		Gedung dan Bangunan			
	03.11	Bangunan Gedung	1	233.636.500,00	
	0312	Monumen	1	3.750.000,00	
3		Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	0416	Jaringan	4	1.566.890.150,00	
		JUMLAH ASET TETAP			
		Aset Tetap Lainnya			
	0517	Buku/Perpustakaan	1	600.000,00	
	0518	Barang Bercorak Kebudayaan	2	253.000,00	
5		Aset Tidak Berwujud			
	0704	Aset tak Berwujud	21	778.519.460,00	
		JUMLAH ASET LAINNYA			
		JUMLAH TOTAL		9.071.929.058,81	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika

Hasil pencapaian kinerja pelayanan di sini adalah pencapaian kinerja Program dan Kegiatan pada periode Renstra tahun 2017–2021 dan secara umum dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan rata-rata pencapaian 100%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Berdasarkan pembahasan terhadap kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik lima tahun terakhir dapat diketahui tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik lima tahun ke depan.

Adapun tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik antara lain :

- a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik, baik dampak positif maupun dampak negatif sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi yang masih sangat terbatas dan kurang merata di wilayah pemerintahan Kabupaten Gresik.
- c. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap teknologi, informasi dan komunikasi, sehingga masih terjadi kesenjangan pemahaman informasi di masyarakat.
- d. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah.
- e. Belum optimalnya keamanan pengelolaan data informasi.
- f. Terbatasnya kecepatan koneksi internet di wilayah pemerintahan kabupaten Gresik.
- g. Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari pengetahuan IT.

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam pengembangan pelayanan antara lain :

- a. Komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
- b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Tersedianya media teknologi informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- d. Kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatnya sistem keamanan informasi bersifat rahasia yang memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan segera terciptanya Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
Tahun 2017-2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2017			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Kemudahan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Wilayah Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas	100%	100%	100%	96,96% / 100%	96,96% / 100%	100%	96,96% / 100%	93,03% / 100%	97,97%	96,96% / 100%	93,03% / 100%	95,94% / 100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan E-Government	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	36,51%	36,70%	101%	38,10%	38,55%	101%	40,96%	42,17%	102,17%	42,17%	42,17%	100%
		Persentase Layanan Publik berbasis elektronik	43%	46%	107%	57%	57%	100%	70,21%	70,21%	100%	85,11%	87,23%	102,49%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Statistik daerah	Pertumbuhan Kunjungan Website	5%	11,14%	223%	350.310 viewer	445.530 viewer	127%	365.541 viewer	548.821 viewer	150%	380.772 viewer	424.104 viewer	111,38%

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DISKOMINFO KABUPATEN GRESIK

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Gresik yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. Diskominfo Kabupaten Gresik melaksanakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan)/*Smart City*. Sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi
2. Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional di bidang IT
3. Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah
4. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
5. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
6. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2021–2026 adalah :

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagaimana berikut :

1. **Gresik yang lebih Mandiri** :

Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegial mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

2. **Gresik yang Sejahtera**

Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial. Adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.

3. **Gresik yang Berdaya Saing**

Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan di segala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan

pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Ke depan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

4. Gresik yang Berkemajuan

Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

5. Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah

Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari

pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Pernyataan visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

- 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif**
- 2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota**
- (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah**
- (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah**
- (5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, Tugas dan Fungsi Diskominfo termasuk dalam **Misi ke-1** yaitu *Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif*. Dalam rangka pencapaian misi pertama di atas maka ditetapkan **Tujuan ke-1** yaitu *“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas berdasarkan Good and Clean Governance”*, serta **Sasaran ke-1** sebagai berikut : *“Meningkatnya Tata Kelola*

Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Keberhasilan pencapaian dicirikan oleh indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah
2. Tingkat kematangan layanan pusat data
3. Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
4. Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan
5. Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK
6. Tingkat kematangan penerapan manajemen data
7. Tingkat kematangan layanan data terbuka
8. Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE
9. Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE
10. Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE
11. Tingkat kematangan penerapan manajemen layanan SPBE
12. Pertumbuhan pengunjung website
13. Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan
14. Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik
15. Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan
16. Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang diintegrasikan
17. Tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang Program Pembangunan Daerah Diskominfo yaitu :

1. Program Aplikasi Informatika
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Permasalahan pelayanan Diskominfo Kabupaten Gresik berdasarkan sasaran renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

Tabel 3.1.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/Kabupaten/Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi - Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE - Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistik daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi di masyarakat khususnya antara desa dan kota - Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi - Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional - Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen kepala daerah untuk mendukung program bidang kominfo - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik - Tersedianya media teknologi informasi dan komunikasi untuk didayagunakan. - Kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang menjamin keterbukaan informasi dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%. Dengan

tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Implementasi SPBE

Implementasi SPBE di Kabupaten Gresik berkembang cukup signifikan, oleh karena itu perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : infrastruktur, aplikasi, kelembagaan dan kebijakan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik. Aplikasi-aplikasi di seluruh OPD tersebut belum terintegrasi. Sangatlah *urgent* untuk dilakukan pengintegrasian sistem-sistem aplikasi yang ada di seluruh perangkat daerah, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik, serta memperkecil kerentanan ekosistem IT. Tetap dikembangkannya infrastruktur TIK terutama jaringan TIK berbasis FO (*Fiber Optic*) sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan, sehingga kinerja OPD-OPD dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal dan tetap dikembangkannya *Gresik Smart City*.

b. Data Center, Command Center dan Media Center

Manfaat *data center* sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Gresik yang semakin berkembang, serta memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat,

efektif dan efisien, pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan, masyarakat akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Namun *data center* tersebut belum dilengkapi dengan keamanan jaringan yang memadai.

- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan IT
Keterbukaan dan kecepatan penyampian informasi kepada masyarakat serta pemenuhan penyelenggaraan SPBE perlu diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang IT.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

4.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Gresik untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar arah setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan masyarakat berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, Tugas dan Fungsi Diskominfo termasuk dalam **Misi ke-1** yaitu “*Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif*”. Dalam rangka pencapaian misi pertama di atas maka ditetapkan **Tujuan** yaitu “*Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi*” diukur dengan indikator indeks SPBE.

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Untuk mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan bahwa tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah : *“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”*.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi
2. Meningkatkan tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE
3. Meningkatkan informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan.

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Persentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)
			Tingkat kematangan layanan pusat data	2	2	2	3	4	4
			Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah	2	2	3	4	4	4
			Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan	2	3	3	4	4	4
			Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK	1	1	3	3	4	4
			Tingkat kematangan penerapan manajemen data	1	3	3	4	4	4
			Tingkat kematangan layanan data terbuka	2	3	4	4	5	5
			Tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	1	2	2	3	3	4

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE	4	4	4	4	4	4
			Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	3	3	4	4	4	4
			Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	1	2	3	3	4	4
			Tingkat kematangan penerapan manajemen layanan SPBE	1	2	2	2	3	3
		Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Pertumbuhan pengunjung website	5% ~ 445309 dari 424104 viewers	5% ~ 467575 dari 445309 viewers	5% ~ 490953 dari 467575 informasi	5% ~ 515501 dari 490953 informasi	5% ~ 541276 dari 515501 informasi	5% ~ 568340 dari 541276 informasi
			Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	5% ~ 2541 informasi dari 2.420 informasi	5% ~ 2668 informasi dari 2541 informasi	5% ~ 2801 informasi dari 2668 informasi	5% ~ 2941 informasi dari 2801 informasi	5% ~ 3088 informasi dari 2941 informasi	5% ~ 3242 informasi dari 3088 informasi
			Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	4	4	4	4	4	4
		Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	100% ~ 100 / 100 data	100% ~ 105 / 105 data	100% ~ 110 / 110 data	100% ~ 115 / 115 data	100% ~ 121 / 121 data	100% ~ 127 / 127 data	
		Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang diintegrasikan	28.57% (2/7 data)	42.86% (3/7 data)	57.14% (4/7 data)	71.43% (5/7 data)	85.72% (6/7 data)	100% (7/7 data)	

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Gresik, Diskominfo mendukung Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana berikut :

Tabel 4.2

Keselarasan Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

<p>MISI KE - 1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif</p>			<p>RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026</p>
<p>TUJUAN-1 Menghadirkan tata kelola pemerintahan Gresik Baru yang inovatif, kolaboratif dan cerdas berdasarkan <i>good and clean governance</i></p>			
<p>SASARAN KE - 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi</p>			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
<p>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi</p>	<p>Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi</p>	<p>Persentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah</p>	<p>Bidang Teknologi Informatika</p>
		<p>Tingkat kematangan layanan pusat data</p>	
		<p>Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah</p>	
		<p>Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan</p>	
		<p>Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK</p>	

		Tingkat kematangan penerapan manajemen data	
		Tingkat kematangan layanan data terbuka	
		Tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	
	Meningkatnya tingkat kematangan proses SPBE	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE	Bidang SPBE
		Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	
		Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	
		Tingkat kematangan penerapan manajemen layanan SPBE	
	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Pertumbuhan pengunjung website	Bidang Statistik dan Informasi Publik
		Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	
		Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	
		Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	
		Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang diintegrasikan	

Tabel 4.3

Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

Tujuan		Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir						
TUJUAN-1										
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi		Indeks SPBE	2,55	4,13						
Sasaran ke - 1		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi								
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					
					2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir
Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	$\frac{\sum \text{perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung jaringan intra pemerintah}}{\sum \text{total perangkat daerah dan kelurahan}} \times 100\%$	Jumlah perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung jaringan intra pemerintah dibagi Jumlah total perangkat daerah dan kelurahan (48 OPD & 26 Kelurahan) dikali 100%	Informasi masyarakat Pengecekan lapangan Data OPD terkait	62% (46 OPD)	97% (46 OPD & 26 kelurahan)	97% (46 OPD & 26 kelurahan)	100% (48 OPD & 26 kelurahan)	100% (48 OPD & 26 kelurahan)	100% (48 OPD & 26 kelurahan)	100% (48 OPD & 26 kelurahan)

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Tingkat kematangan layanan pusat data	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Data OPD terkait	2	2	2	2	3	4	4
Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Data OPD terkait	2	2	2	3	4	4	4
Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Data OPD terkait	2	2	3	3	4	4	4

Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Data OPD terkait	1	1	1	3	3	4	4
Tingkat kematangan penerapan manajemen data	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Data OPD terkait	1	1	3	3	4	4	4
Tingkat kematangan layanan data terbuka	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Data OPD terkait	2	2	3	4	4	5	5

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Data OPD terkait	1	1	2	2	3	3	4
Sasaran ke - 2		Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE								
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					
					2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir
Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Data OPD terkait	4	4	4	4	4	4	4

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Data OPD terkait	1	3	3	4	4	4	4
Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Data OPD terkait	1	1	2	3	3	4	4
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Data OPD terkait	1	1	2	2	2	3	3
Sasaran ke - 3	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan									

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					
					2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir
Pertumbuhan pengunjung website	Jumlah pengunjung website pada Tahun (n) - Jumlah pengunjung website pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah pengunjung website pada Tahun (n-1)	Jumlah pengunjung website pada Tahun (n) - Jumlah pengunjung website pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah pengunjung website pada Tahun (n-1)	Data OPD terkait	424104 viewers	5% ~ 44530 9 dari 424104 viewer s	5% ~ 467575 dari 445309 viewer s	5% ~ 490953 dari 467575 informa si	5% ~ 515501 1 dari 490953 inform asi	5% ~ 541276 dari 515501 informa si	5% ~ 568340 dari 541276 informa si
Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	Jumlah Informasi yang dipublish pada Tahun (n) - Jumlah Informasi yang dipublish pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah informasi yang dipublish pada Tahun (n-1)	Jumlah Informasi yang dipublish pada Tahun (n) - Jumlah Informasi yang dipublish pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah informasi yang dipublish pada Tahun (n-1)	Data OPD terkait	2.420 informasi	5% ~ 2541 informasi dari 2.420 informasi	5% ~ 2668 informasi dari 2541 informasi	5% ~ 2801 informasi dari 2668 informasi	5% ~ 2941 informasi dari 2801 informasi	5% ~ 3088 informasi dari 2941 informasi	5% ~ 3242 informasi dari 3088 informasi
Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	Data OPD terkait	4	4	4	4	4	4	4

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Presentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan Tahun n dibagi total data statistik sektoral (dengan target rencana peningkatan 5 % dari Tahun n-1) dikali 100%	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan Tahun n dibagi total data statistik sektoral (dengan target rencana peningkatan 5 % dari Tahun n-1) dikali 100%	Data OPD terkait	95 data yang dipublikasikan	100% ~ 100 / 100 data	100% ~ 105 / 105 data	100% ~ 110 / 110 data	100% ~ 115 / 115 data	100% ~ 121 / 121 data	100% ~ 127 / 127 data
Persentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang di Integrasikan	Jumlah Data Sektoral yang dintegrasikan dibagi Jumlah Seluruh Data Sektoral (7 data) x 100%	Jumlah Data Sektoral yang dintegrasikan dibagi Jumlah Seluruh Data Sektoral (7 data) x 100%	Data OPD terkait	14.28% (1/7 data)	28.57% (2/7 data)	42.86% (3/7 data)	57.14% (4/7 data)	71.43% (5/7 data)	85.72% (6/7 data)	100% (7/7 data)

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Gresik.

Tabel 4.4
Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

<p>MISI KE - 1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif</p>			<p>RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026</p>	
<p>TUJUAN - 1 Menghadirkan tata kelola pemerintahan Gresik Baru yang inovatif, kolaboratif dan cerdas berdasarkan <i>good and clean governance</i></p>				
<p>SASARAN KE - 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi</p>				
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Pengamanan jaringan dan data	Memperkecil kerentanan ekosistem IT	Urusan pemerintahan bidang persandian
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola IT sampai tingkat operator di lingkungan pemerintahan dengan cara Fasilitasi dan Pendampingan	Membuat program dan kegiatan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
	Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat	Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun <i>early warning system</i>	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

			pengendalian yang berorientasi pada hasil	
	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Mengembangkan sistem monitoring berbasis IT terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pembangunan daerah	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	Urusan pemerintahan bidang statistik

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GRESIK

**5.1. Rencana Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Gresik**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program Renstra tahun 2021–2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Review Matriks Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (3 URUSAN)							15,031,626,000		23,342,184,835		22,838,165,000		27,231,587,000		35,046,826,000		40,772,625,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							14,654,224,000		22,521,930,835		21,777,667,000		25,656,693,000		32,496,190,000		36,324,570,000	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD				Realisasi Sasaran Program/Target Sasaran Program	84.76%	100%	7,868,302,000	100%	7,710,464,835	100%	7,913,799,000	100%	9,332,022,000	100%	10,127,221,000	100%	11,410,806,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan				Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan		14 Dokumen	38,151,770	13 Dokumen	17,972,000	13 Dokumen	16,000,000	13 Dokumen	19,600,000	13 Dokumen	21,000,000	13 Dokumen	29,600,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan				Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan		90 orang	35,841,000	60 orang	15,651,000	60 orang	14,000,000	60 orang	16,500,000	60 orang	17,000,000	60 orang	22,000,000
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJIP, LPPD, SAKIP, Laporan Monev Kegiatan)				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJIP, LPPD, SAKIP, Laporan Monev Kegiatan)		12 Dokumen	2,310,770	12 Dokumen	2,321,000	12 Dokumen	2,000,000	12 Dokumen	3,100,000	12 Dokumen	4,000,000	12 Dokumen	7,600,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan				Jumlah capaian total sub kegiatan dibagi dengan jumlah sub kegiatan dikali 100%		100%	3,600,042,000	100%	3,855,846,200	100%	4,130,150,820	100%	4,783,191,820	100%	5,167,821,492	100%	5,701,285,712

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN DISKOMINFO				Jumlah gaji dan Tunjangan ASN DISKOMINFO dalam 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	3,592,142,000	1 Tahun	3,851,356,200	1 Tahun	4,126,491,820	1 Tahun	4,776,491,820	1 Tahun	5,159,255,102	1 Tahun	5,685,180,611
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD				Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD dalam 1 Tahun	1 Jenis	1 Jenis	2,200,000	1 Jenis	1,220,000	1 Jenis	1,262,000	1 Jenis	2,500,000	1 Jenis	3,221,020	1 Jenis	3,543,122
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan/data Tanggapan Hasil Pemeriksaan perangkat daerah				Jumlah Bahan/data Tanggapan Hasil Pemeriksaan perangkat daerah	2 Jenis	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	3,382,071
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran perangkat daerah				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran perangkat daerah dalam 1 tahun	3 Jenis	3 Jenis	5,700,000	3 Jenis	3,270,000	3 Jenis	2,397,000	3 Jenis	4,200,000	3 Jenis	5,345,370	3 Jenis	9,179,907
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Kepegawaian perangkat daerah				Jumlah administrasi Kepegawaian perangkat daerah dalam 1 tahun	2 sub kegiatan	3,000,000,000	2 sub kegiatan	3,000,000,000	2 sub kegiatan	3,000,000,000	2 sub kegiatan	3,026,000,000	2 sub kegiatan	3,030,000,000	2 sub kegiatan	3,041,400,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian kerja lapangan				Jumlah Pakaian kerja lapangan yang disediakan	64 stel	-	70 stel	-	70 stel	-	70 stel	26,000,000	70 stel	30,000,000	70 stel	41,400,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Cukai kepada masyarakat				Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Cukai kepada masyarakat	8 kali	3,000,000,000	8 kali	3,000,000,000	8 kali	3,000,000,000	8 kali	3,000,000,000	8 kali	3,000,000,000	8 kali	3,000,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah				Jumlah administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	7 sub kegiatan	245,884,014	7 sub kegiatan	112,110,000	7 sub kegiatan	75,500,000	7 sub kegiatan	297,000,000	7 sub kegiatan	433,120,000	7 sub kegiatan	707,932,000	

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	StatusIndikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bahan Alat Listrik Jumlah Media Converter				Jumlah bahan alat listrik yang disediakan, jumlah media converter yang disediakan		8 jenis (battery A3, battery kotak, battery a2, kabel roll 25 meter, antena tv dan cctv, kabel roll 25 meter)	3,999,574	8 jenis (battery A3, battery kotak, battery a2, kabel roll 25 meter, kabel roll 15 meter, stop kontak 4	1,510,000	8 jenis (battery A3, battery kotak, battery a2, kabel roll 25 meter, kabel roll 15 meter, stop kontak 4	1,500,000	8 jenis (battery A3, battery kotak, battery a2, kabel roll 25 meter, kabel roll 15 meter, stop kontak 4	10,000,000	8 jenis (battery A3, battery kotak, battery a2, kabel roll 25 meter, kabel roll 15 meter, stop kontak 4	13,000,000	8 jenis (battery A3, battery kotak, battery a2, kabel roll 25 meter, kabel roll 15 meter, stop kontak 4	16,300,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Pendingin Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Bahan Komputer Jumlah Komputer dan Peralatan Komputer				Jumlah alat pendingin yang disediakan, jumlah alat tulis kantor yang disediakan, jumlah bahan komputer yang disediakan, jumlah komputer dan peralatan komputer yang disediakan		1 jenis (ac=3), 37 jenis (atk), 4 jenis (bahan komputer), 4 jenis (peralatan komputer)	179,942,537	1 jenis (ac=3), 37 jenis (atk), 4 jenis (bahan komputer), 4 jenis (peralatan komputer)	60,000,000	1 jenis (ac=2), 37 jenis (atk), 4 jenis (bahan komputer), 4 jenis (peralatan komputer)	20,000,000	1 jenis (ac=3), 37 jenis (atk), 4 jenis (bahan komputer), 4 jenis (peralatan komputer)	130,000,000	1 jenis (ac=2), 37 jenis (atk), 4 jenis (bahan komputer), 4 jenis (peralatan komputer)	225,920,000	1 jenis (ac=3), 37 jenis (atk), 4 jenis (bahan komputer), 4 jenis (peralatan komputer)	328,512,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan Dan Peralatan pembersih				Jumlah Bahan dan alat pembersih yang disediakan		23 jenis : - 6 buah alat pel, 8 buah alat	6,941,970	23 jenis : - 7 buah alat pel, 8 buah cairan	4,000,000	23 jenis : - 8 buah alat pel, 10 buah cairan	5,000,000	23 jenis : - 10 buah alat pel, 12 buah cairan	12,000,000	23 jenis : - 12 buah alat pel, 14 buah cairan	13,000,000	23 jenis : - 12 buah alat pel, 17 buah cairan	18,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		9 dos air botol, 301 galon,	20,463,078	15 dos air botol, 320 galon,	18,000,000	20 dos air botol, 325 galon, 22 dos air	20,000,000	20 dos air botol, 325 galon, 22 dos air	43,500,000	20 dos air botol, 325 galon, 22 dos air	52,550,000	20 dos air botol, 325 galon, 22 dos air	93,205,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Banner Jumlah Barangcetakan dan Penggandaan Jumlah jasa Publikasi Ucapan				Jumlah banner yang dicetak, jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, jumlah publikasi ucapan yang dicetak		12 kali cetak spanduk/banner, 415 lembar amplop kop bunati	20,514,355	12 kali cetak spanduk/banner, 450 lembar amplop kop bunati	12,600,000	12 kali cetak spanduk/banner, 500 lembar amplop kop bunati	12,000,000	12 kali cetak spanduk/banner, 550 lembar amplop kop bunati	32,000,000	12 kali cetak spanduk/banner, 600 lembar amplop kop bunati	43,000,000	12 kali cetak spanduk/banner, 600 lembar amplop kop bunati	77,000,000

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	StatusIndikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				Jumlah bahan bacaan yang disediakan		4 jenis bahan bacaan	2,022,500	4 jenis bahan bacaan	2,000,000	4 jenis bahan bacaan	2,000,000	4 jenis bahan bacaan	9,000,000	4 jenis bahan bacaan	10,000,000	4 jenis bahan bacaan	15,300,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				Jumlah fasilitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan		2 jenis (luar daerah , dalam daerah	12,000,000	2 jenis (jawa timur 12 kali, luar jawa	14,000,000	2 jenis (jawa timur 14 kali, luar jawa	15,000,000	2 jenis (jawa timur 16 kali, luar jawa	60,500,000	2 jenis (jawa timur 18 kali, luar jawa	75,650,000	2 jenis (jawa timur 24 kali, luar jawa timur 18	159,615,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		2 sub kegiatan	3,537,000	2 sub kegiatan	2,500,000	2 sub kegiatan	-	2 sub kegiatan	130,000,000	2 sub kegiatan	160,790,000	2 sub kegiatan	351,769,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah ruangan kantor yang diberikan sekat antar meja/vertikal blind/kaca film/rak almari				jumlah ruangan kantor yang diberikan sekat antar meja/vertikal blind/kaca film/rak almari		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	90,000,000	1 paket	105,000,000	1 paket	200,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel/Kursi				Jumlah mebel (meja, kursi, almari) yang disediakan		2 jenis (kursi plastik, kursi sekreta	3,537,000	8 buah kursi kerja, 8 buah meja	2,500,000	6 buah kursi kerja, 6 buah meja		8 buah kursi kerja, 8 buah meja	40,000,000	10 buah kursi kerja, 10 buah meja kerja, 4 almari	55,790,000	10 buah kursi kerja, 10 buah meja kerja, 3 almari	151,769,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah				Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun		3 jasa	825,393,596	3 jasa	702,036,635	3 jasa	672,148,180	3 jasa	846,080,180	3 jasa	1,014,839,508	3 jasa	1,139,204,288
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Operasional Bulanan				Jumlah operasional bulanan yang disediakan		5 jenis (belanja tagihan telepon, belanja air,	282,684,288	5 jenis (belanja tagihan telepon, belanja tagihan air,	183,000,000	5 jenis (belanja tagihan telepon, belanja tagihan air,	153,847,882	5 jenis (belanja tagihan telepon, belanja tagihan air,	259,529,853	5 jenis (belanja tagihan telepon, belanja tagihan air,	422,574,149	5 jenis (belanja tagihan telepon, belanja tagihan air,	504,611,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		3 jenis (pemeliharaan peralatan dan	42,909,308	3 jenis (pemeliharaan peralatan dan	18,636,635	3 jenis (pemeliharaan peralatan dan	15,500,298	3 jenis (pemeliharaan peralatan dan	80,150,327	3 jenis (pemeliharaan peralatan dan	84,665,359	3 jenis (pemeliharaan peralatan dan mesin	125,993,288

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	StatusIndikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Non Strata Satu Jumlah Tenaga Administrasi Strata Satu Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan				Jumlah Tenaga Administrasi Non Strata Satu, Tenaga Administrasi Strata Satu, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan yang ada		6 orang, 9 orang, 3 orang, 1 orang	499,800,000	4 orang, 11 orang, 3 orang, 1 orang	500,400,000	3 orang, 12 orang, 3 orang, 1 orang	502,800,000	1 orang, 14 orang, 3 orang, 1 orang	506,400,000	1 orang, 14 orang, 3 orang, 1 orang	507,600,000	1 orang, 14 orang, 3 orang, 1 orang	508,600,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah				Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah		2 jenis	155,293,620	2 jenis	20,000,000	2 jenis	20,000,000	2 jenis	230,150,000	2 jenis	299,650,000	2 jenis	439,615,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas				Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		6 kendaraan	45,393,620	6 kendaraan	20,000,000	6 kendaraan	20,000,000	6 kendaraan	80,150,000	6 kendaraan	99,650,000	6 kendaraan	139,615,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara				Jumlah Gedung kantor yang dipelihara		1 paket	109,900,000	1 paket		- 1 paket		- 1 paket	150,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	300,000,000
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi				Jumlah Pengaduan Yang Difasilitasi (diteruskan, didisposisi, dijawab) Dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk X 100%	90,54% (287/317)	100%	1,510,865,000	100%	5,261,496,000	100%	3,873,913,000	100%	2,871,171,000	100%	3,659,639,000	100%	4,730,433,000
	2. Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi				Jumlah jenis informasi publik yang dipublikasi dibagi total jenis informasi publik x 100%	0%	100% (3/3)		100% (3/3)		100% (3/3)		100% (3/3)	100% (3/3)		100% (3/3)		100% (3/3)

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	28	29
	3. Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID				Jumlah permintaan data yang difasilitasi PPID dibagi jumlah permintaan data x 100%	100% (3/3)	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Konten penyelenggaraan pemerintahan yang Di Publikasikan melalui media				Jumlah Konten penyelenggaraan pemerintahan yang Di Publikasikan melalui media	2420	2541	1,510,865,000	2668	5,261,496,000	2801	3,873,913,000	2941	2,871,171,000	3088	3,659,639,000	3242	4,730,433,000
	2. Jumlah Media yang dimanfaatkan untuk publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan				Jumlah Media yang dimanfaatkan untuk publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan	5 media	7 media		8 media		8 media		9 media		9 media		9 media	
	3. Jumlah panggilan kedaruratan yg difasilitasi				Jumlah panggilan kedaruratan yg difasilitasi	192	211		232		255		281		309		340	
	4. Jumlah Pengaduan yang masuk dan difasilitasi				Jumlah Pengaduan yang masuk dan difasilitasi	317	333		350		367		385		405		425	
Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Jumlah rapatkoordinasi fasilitasi PPID					0	3	-	6	178,131,000	6	227,196,500	6	300,794,750	6	401,192,125	6	901,788,200
	Jumlah rapatkoordinasi fasilitasi pengaduan di aplikasi lapor.go.id						3		12		12		12		12		12	
	jumlah pelatihan penggunaan aplikasi lapor.go.id						1		2		2		2		2		2	
	jumlah Sosialisasi terkait informasi publik oleh PPID lingkup OPD						1		2		2		2		2		2	

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	StatusIndikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektor al			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29
	Jumlah Sosialisasi dan pelatihan terkait informasi publik oleh PPID lingkup Desa dan kelurahan										36		36		36		36	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pemeliharaan website gresikkab.go.id						1	271,559,737	1	348,715,700	1	378,587,200	1	361,446,000	1	387,590,600	1	437,349,600
	Jumlah pemeliharaan website SiDesa								1		1		1		1		1	
	Jumlah pemeliharaan website siklip								1		1		1		1		1	
	Jumlah pemeliharaan website PPID								1		1		1		1		1	
	Jumlah lisensi flipping								1		1		1		1		1	
	Jumlah rapat koordinasi update data penyelenggaraan pemerintahan dengan OPD						3		4		4		4		4		4	
	Jumlah koordinasi kegiatan OPD yang dipublikasikan						3		48		48		48		48		48	
	Jumlah lisensi cpanel tahunan					1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah web hosting OPD yang di kelola						20		25		30		35		40		45	
	Jumlah Pembelian PC untuk desain grafis								2		2							
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pembuatan Perda Radio suara Gresik						617,705,263		1	734,956,700		813,452,400		919,297,700		978,227,350		1,076,050,100

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	StatusIndikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sekto ral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29
	Jumlah Koordinasi dengan Balmon dan pusat terkait perijinan Radio								3		2		2		2		2	
	Jumlah luran tahunan frekuensi radio								1		1		1		1		1	
	Jumlah sewa internet (Mbps)					10	10		10		10		10		10		10	
	Jumlah Tenaga Penyiar yang di rekrut					4	5		6		6		6		6		6	
	Jumlah Tenaga teknis radio						0		1		1		1		1		1	
	Jumlah Tenaga kontent kreatif untuk sosial media								2		2		2		2		2	
	Jumlah Tenaga kontent kreatif untuk video								1		1		1		1		1	
	jumlah lisensi lagu yang dibeli					300	300		350		400		450		500		550	
	Jumlah lisensi radiobost								1		1		1		1		1	
	Jumlah lisensi Adobe Audition								2		2		2		2		2	
	jumlah pemeliharaan pemancar radio FM						1		1		1		1		1		1	
	jumlah Pemeliharaan peralatan streaming						1		1		1		1		1		1	
	jumlah reportase yang dilakukan						132		240		240		240		240		240	
	jumlah domain dan hostingsuaragresik.id						1		1		1		1		1		1	
	jumlah penayangan di media televisi								2		3		4		5		6	
	Jumlah rapat monitoring dan evaluasi crew radio						44		48		48		48		48		48	

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29
	Jumlah rapat monitoring dan evaluasi media								12		12		12		12		12	
	Jumlah PC untuk streaming dan siaran yang di beli										2		1					
Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Tenaga Call Taker dan dispatch yang di rekrut					9	9	621,600,000	12	3,701,370,400.00	12	2,058,834,900	12	779,327,450	9	1,239,932,525	9	1,571,214,200
	jumlah tenaga sound dan multi media center								2		2		2		2		2	
	Jumlah sewa aplikasi kedaruratan call 112					1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah sewa Backup internet (Mbps)					3	0		50		50		50		50		3	
	Jumlah peralatan audio visual media center										1							
	Jumlah Pembangunan media Centre								1									
	Jumlah aplikasi pendukung media center										3		3		3		3	
	Operasional media center 24 jam x 7 hari										100%		100%		100%		100%	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Jatim Kominfo Festival (JKF) yang di ikuti oleh KIM								1	31,719,000		97,578,500	1	177,215,300		231,297,600	1	300,492,200
	Jumlah pelatihan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)								4		4		4		4		4	
penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah rekomendasi Branding Kabupaten Gresik					0	5	0		266,603,200		298,263,500		333,089,800		421,398,800		443,538,700
	Jumlah Kebijakan Branding Kabupaten Gresik								2									

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29
	Jumlah sosialisasi pemanfaatan city branding untuk arsitektur kota, kantor pemerintahan, destinasi wisata, pasar, usaha mikro										3		3		3		3	
	Jumlah Sosialisasi ke usaha mikro untuk memanfaatkan city branding										3		3		3		3	
	Jumlah rapat koordinasi dengan Media milik Kelompok masyarakat yang bermitra dalam diseminasi informasi					0	0		8		8		8		8		8	
	Jumlah pendampingan UMKM yang difasilitasi untuk lokal branding						0		6		10		15		20		25	
	Jumlah pendampingan comic kreatif								5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali	
	Jumlah lomba start up								1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	
	Jumlah pengembangan teknis keterampilan digital								1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1. Presentase OPD yang Memanfaatkan Ruang Server				Jumlah OPD yang Memanfaatkan Ruang Server dibagi jumlah OPD di Kab. Gresik	25% (12 OPD / 48 OPD)	25%	4,493,758,120	25%	8,094,186,000	25%	8,211,092,600	27%	11,202,521,974	29%	15,883,906,500	31%	17,097,365,200
	2. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Aset TIK				Jumlah OPD yang Menerapkan Manajemen Aset	0%	0%		2%		25%		50%		75%		100%	
	3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan				Jumlah OPD yang Menggunakan Sistem	0%	0%		2%		25%		50%		75%		100%	

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
4. Persentase data terbuka yang dipertukarkan				Jumlah OPD yang Memanfaatkan pertukaran data dibagi jumlah OPD	0%	0%			2%				50%			75%		100%
5. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Data				Jumlah OPD yang menerapkan Manajemen Data	0%	0%			2%				50%			75%		100%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1. Jumlah server backup yang di adakan			Jumlah server backup yang di adakan	0	2	179,318,396	1	3,595,421,211	1	2,987,389,574	1	4,742,633,797	1	6,385,328,867	1	6,929,088,485	
	2. Jumlah UPS yang diadakan			Jumlah UPS yang diadakan	0	1		1		1		1		1		1		
	3. Jumlah tenaga ahli programmer yang di rekrut			Jumlah tenaga ahli programmer yang di rekrut	0	1		1		1		1		1		1		
	4. Kapasitas server clustering			Kapasitas server clustering	CPU : 132 ; Memory : 482 GB ; Storage : 20 TB	CPU : 192 ; Memory : 610 GB ; Storage : 28 TB		CPU : 192 ; Memory : 610 GB ; Storage : 28 TB		CPU : 192 ; Memory : 610 GB ; Storage : 28 TB		CPU : 256 ; Memory : 610 GB ; Storage : 36 TB		CPU : 256 ; Memory : 610 GB ; Storage : 44 TB		CPU : 256 ; Memory : 610 GB ; Storage : 52 TB		
	5. Kapasitas server mirroring			Kapasitas server mirroring						CPU : 192 ; Memory : 610 GB ; Storage :		CPU : 256 ; Memory : 610 GB ; Storage :		CPU : 256 ; Memory : 610 GB ; Storage :		CPU : 256 ; Memory : 610 GB ; Storage :		
	6. Kapasitas server backup data			Kapasitas server backup data		12 TB			20 TB			28 TB		36 TB		44 TB		52 TB
	7. Kapasitas Backup Listrik (UPS)			Jumlah Kapasitas Backup Listrik (UPS)	1kVA	2kVA			40kVA			80kVA		120kVA		160kVA		200kVA
	8. Manajemen Data Warehouse/Big Data			Jumlah Kelurahan, Kecamatan Dan OPD					1 paket			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	StatusIndikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	18	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perencanaan Pembangunan media centre						1 paket	99,999,716	1 paket	3,514,204,731		2,882,490,620		4,592,000,000		6,146,600,000		6,669,550,288
	Jumlah Pembangunan Ruang Server Baru								1 paket									
	Jumlah Pendeteksi suhu ruangan								1									
	Jumlah AC central								1									
	Jumlah server clustering yang di adakan								2		2							
	Jumlah server backup yang di adakan								1		1		1		1		1	
	Jumlah UPS yang diadakan								1								1	
	Jumlah listrik permium yang diadakan								1									
	Jumlah CCTV e-tilang										4		6		8		10	
	Jumlah rapat koordinasi terkait pemanfaatan ruang server oleh OPO						5		5		5		5		5		5	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah tenaga ahli proگرامer yang di rekrut					0	1	79,318,680	1	81,216,482	1	104,898,954	1	150,633,797	1	238,728,867	1	259,538,197
	Jumlah rapat koordinasi tentang layanan penghubung						2		2		4		4		4		4	
	Jumlah rapat monitoring database OPD						1		2		2		2		2		2	
	Jumlah sosialisasi arsitektur data dan informasi						1		1		1		1		1		1	
	Jumlah perjalanan dinas terkait layanan penghubung di OPD						10		10		10		10		10		10	

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Status indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
17	18	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan				Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	300 mbps	500 mbps	4,314,439,724	1 Gbps	4,498,764,787	1 Gbps	5,223,703,024	1,2 Gbps	6,459,888,177	1,6 Gbps	9,498,577,633	1,8 Gbps	10,168,276,715
	Jumlah OPD kelurahan, kecamatan dan OPD yang terlayani jaringan intranet					46 OPD	46 OPD dan 26 Kelurahan		46 OPD dan 26 Kelurahan		46 OPD dan 26 Kelurahan		46 OPD dan 26 Kelurahan		46 OPD dan 26 Kelurahan		46 OPD dan 26 Kelurahan	
	jumlah pemeliharaan jaringan intra					1	1		1		1		1		1		1	
	jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik					1	1		1		1		1		1		1	
	jumlah pemeliharaan jalur CCTV						1		1		1		1		1		1	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan					300 mbps	500 mbps	4,314,439,724	1 Gbps	4,498,764,787	1 Gbps	5,223,703,024	1,2 Gbps	6,459,888,177	1,6 Gbps	9,498,577,633	1,8 Gbps	10,168,276,715
	Jumlah Kelurahan, Kecamatan Dan OPD Yang Terlayani Jaringan Intranet					46 OPD	46 OPD dan 26 kelurahan		46 OPD dan 26 kelurahan		48 OPD dan 26 kelurahan		48 OPD dan 26 kelurahan		48 OPD dan 26 kelurahan		48 OPD dan 26 kelurahan	
	Jumlah metro untuk mendukung jaringan intra pemerintah						44		44		44		44		44		44	
	Jumlah tenaga ahli jaringan yang di rekrut					1	1		1		1		1		1		1	
	jumlah server clustering yang diadakan						4											
	Jumlah iuran As number (tahunan)					1	1		1		1		1		1		1	

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
17	18	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29
	jumlah pemeliharaan jaringan intra					1	1		1		1		1		1		1	
	jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik					1	1		1		1		1		1		1	
	jumlah pemeliharaan jalur CCTV						1		1		1		1		1		1	
	rapat koordinasi terkait penggunaan jaringan intra						2		3		3		3		3		3	
	jumlah perjalanan dinas pengecekan troubleshooting jaringan						12		24		24		24		24		24	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi				JUMLAH DOKUMEN KEBIJAKAN YANG DIEVALUASI / JUMLAH DOKUMEN SPBE YANG TERSEDIA X 100%	0%	100% (1/1)	781,298,880	100% (3/3)	1,455,784,000	100% (3/3)	1,778,862,400	100% (3/3)	2,250,978,020	100% (3/3)	2,825,423,500	100% (3/3)	3,085,965,800
	Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi				Jumlah indikator SPBE yang dievaluasi dibagi jumlah indikator kematangan spbe	100% (37/37)	100% (47/47)		100% (47/47)		100% (47/47)		100% (47/47)		100% (47/47)		100% (47/47)	
	Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE				JUMLAH OPD YANG BERKOLABORASI / JUMLAH OPD X 100%	0%	50%		75%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi				jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi dibagi total aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan	0%	0%		13% (2/15)		33% (5/15)		53% (8/15)		73% (11/15)		100% (15/15)	

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	StatusIndikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE				JUMLAH OPD YANG MENERAPKAN MANAJEMEN LAYANAN SPBE/ JUMLAH OPD YANG MEMILIKI LAYANAN SPBE (20 OPD) X 100%	0%	10%		20%		30%		50%		100%		100%	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi				Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	0	1	781,298,880	3	1,455,784,000	3	1,778,862,400	3	2,250,978,026	3	2,825,423,500	3	3,085,965,800
	2. Jumlah Indikator SPBE yang dievaluasi				Jumlah Indikator SPBE yang dievaluasi	47	47		47		47		47		47		47	
	3. Jumlah OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE				Jumlah OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	0	24		36		48		48		48		48	
	4. jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi				jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan	0	0		2		3		3		3		4	
	5. Jumlah Opd yang menerapkan manajemen Layanan SPBE				Jumlah Opd yang menerapkan manajemen Layanan SPBE	0	2		4		6		10		20		20	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi				Dokumen	0	1	59,525,000	3	300,000,000	3	330,000,000	3	433,000,000	3	499,300,000	3	539,230,000
	2. Jumlah Kebijakan SPBE yang disusun				Dokumen	0.5	1		0		0		0		0		0	

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektor			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
17	18	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29
	3. Jumlah SOP SPBE yang disusun				Dokumen	0	0		2		2		2		2		2	
	4. Jumlah Rapat Koordinasi SPBE				Kali	1	3		4		4		4		4		4	
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Jumlah FGD Penerapan Peta Rencana SPBE				Kali	0	6	129,404,000	6	200,000,000	6	220,000,000	6	262,000,000	6	366,200,000	6	402,820,000
	2. Jumlah OPD yang difasilitasi dalam Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE				OPD	0	12		24		48		48		48		48	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1. FGD Penerapan Smart City				Kali	0	7	148,250,000	7	250,000,000	7	275,000,000	7	302,500,000	7	382,750,000	7	426,025,000
	2. Jumlah Rapat Evaluasi Smart City				Kali	0	2		3		3		3		3		3	
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)																		
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Lisensi Office 365 yang disewa;				Lisensi	0	1 lisensi	399,703,380	2 lisensi	375,000,000	2 lisensi	400,000,000	3 lisensi	574,229,426	3 lisensi	700,000,000	4 lisensi	750,000,000
	Jumlah Lisensi Zoom yang disewa;				Lisensi	0	4 lisensi		6 lisensi		6 lisensi		6 lisensi		7 lisensi		7 lisensi	
	Jumlah Aplikasi Gresikpedia yang disewa;				Bulan	0	11 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12		12		12	
	Jumlah Tenaga Ahli Programmer yang direkrut;				Orang	0	1 orang		1 orang		1 orang		2 orang		2 orang		2 orang	

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	StatusIndikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
17	18	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29
Jumlah Portal Layanan Administrasi Pemerintahan yang dibangun/Sewa Aplikasi One Handling System					Paket	0	0	1 Paket		1 Paket			1		1			1
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Bid. SPBE dan TI)	Rapat OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE (4 x 48 OPD)				OPD	0	0	44,416,500	48	180,000,000	48	300,000,000	48	350,000,000	48	420,000,000	48	480,000,000
	Jasa konsultansi Pengelolaan Layanan SPBE				Paket	0	0		1		1		1		1		1	
	Pembangunan Single sign on				Paket	0	0		1		1		1		1		1	
	Pembangunan Aplikasi Helpdesk				Paket	0	0				1		1		1		1	
	Jumlah Pelatihan Manajemen jaringan OPD					0	0	-	2 kali	150,784,000	4 kali	253,862,400	4 kali	329,248,600	4 kali	457,173,500	4 kali	487,890,800
	Jumlah Pelatihan Manajemen data					0	0		2 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	
	Jumlah Pelatihan Sistem Penghubung					0	0		2 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								241,924,000		565,929,000		620,747,000		727,580,000		856,759,000		1,002,890,000
URUSAN STATISTIK																		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun				Jumlah data sektoral lingkup OPD yang disusun dibagi jumlah OPD (30 OPD)	0%	7% (2/30)	241,924,000	13% (4/30)	565,929,000	20% (6/30)	620,747,000	27% (8/30)	727,580,000	33% (10/30)	856,759,000	33% (10/30)	1,002,890,000

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Status Indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektor al			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sektoral yang disusun					2	241,924,000	4	565,929,000	6	620,747,000	8	727,580,000	10	856,759,000	10	1,002,890,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Cetakan ke dua Buku DDA /KDA yang diterbitkan BPS Kabupaten Gresik					029 buku	241,924,000	100	487,329,000.00	100	534,287,000.00	100	637,474,000	100	758,142,400	100	892,811,800	
	Jumlah rapat pembuatan Kebijakan satu data							6										
	Jumlah Sosialisasi tentang data sektoral							1		1		1		1		1		
	Jumlah Sosialisasi tentang Wali data					1		1		1		1		1		1		
	Jumlah rapat koordinasi data statistik sektoral							4		4		4		4		4		
	Jumlah penyusunan data inflasi Kabupaten Gresik							1		1		1		1		1		
	Jumlah penyusunan data analisa bencana Balongpanggang Benjeng Cerme							1		1		1		1		1		
	Jumlah penyusunan data NTN dan NTP							1		1		1		1		1		
	Jumlah tenaga ahli analis statistik yang di					1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Verifikasi data kemiskinan																	
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah OPD yang beri pelatihan tentang data statistik sektoral					0	0	58	78,600,000	58	86,460,000	58	90,106,000	58	98,616,600	58	110,078,200	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							135,478,000		254,325,000		439,751,000		847,314,000		1,693,877,000		3,445,165,000	
URUSAN PERSANDIAN																		

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Status indikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penanganan Serangan Cyber				Jumlah serangan cyber yang ditangani dibandingkan jumlah serangan cyber yang diterima	100% (7/7)	100%	135,478,000	100%	254,325,000	100%	439,751,000	100%	847,314,000	100%	1,693,877,000	100%	3,445,165,000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi				Jumlah OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi dibagi jumlah OPD	0	2%	135,478,000	50%	254,325,000	75%	439,751,000	100%	847,314,000	100%	1,693,877,000	100%	3,445,165,000
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang diberikan pelatihan tentang keamanan informasi					0	0		58	103,326,000	58	230,998,900	58	254,098,790	58	279,508,669	58	307,459,535
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Bidang Teknologi dan Informatika)	Jumlah Firewall yang digunakan untuk keamanan jaringan					0	0	135,478,000	1	150,999,000	1	208,752,100	1	593,215,210	1	1,414,368,330	1	3,137,705,460
	Jumlah Firewall yang digunakan untuk keamanan data					0	0		0		1		1		1		1	
	Jumlah Pengamanan yang digunakan untuk mengamankan transmisi data antar dua sistem yang					1 Wildcard SSL	1 Wildcard SSL		1 Wildcard SSL		1 Wildcard SSL		1 Wildcard SSL		1 Wildcard SSL		1 Wildcard SSL	
	Jumlah user Antivirus					0	25		50		50		50		50		50	
	Jumlah tenaga ahli untuk penanganan insiden keamanan yang					0	1		2		2		2		2		2	
	Jumlah maintenance email gresikkab.go.id					0	0		1		1		1		1		1	
	Jumlah Sosialisasi arsitektur keamanan informasi					0	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Sosialisasi Digital Signature					0	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah pelatihan penggunaan Digital Signature					0	1		4		4		4		4		4	

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	StatusIndikator outcome			Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		SDG's	SPM	Sektoral			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
17	18	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29
	Jumlah evaluasi penggunaan Digital Signature						1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Perjalana Dinas terkait penanganan keamanan infomasi						17		20		24		24		24		24	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Infomasi										1		1		1		1	
Keterangan																		
Urusan																		
Program																		
Kegiatan																		
Sub Kegiatan																		

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pada bab ini dijabarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 terkait dengan komunikasi dan informatika diukur dengan indikator indeks SPBE.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel. 6.1

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan RPJMD 2021-2026	Indikator Sasaran RPJMD 2021-2026	Indikator Sasaran Renstra Diskominfo	Kondisi kinerja awal periode RPJMD (baseline)	Target capaian					Kondisi kinerja akhir periode RPJMD (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	Persentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	62% (46 OPD)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	100% (48 OPD dan 26 kelurahan)	100% (48 OPD dan 26 kelurahan)	100% (48 OPD dan 26 kelurahan)	100% (48 OPD dan 26 kelurahan)
2			Tingkat kematangan layanan pusat data	2	2	2	2	3	4	4
3			Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah	2	2	2	3	4	4	4
4			Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan	2	2	3	3	4	4	4
5			Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK	1	1	1	3	3	4	4
6			Tingkat kematangan penerapan manajemen data	1	1	3	3	4	4	4
7			Tingkat kematangan layanan data terbuka	2	2	3	4	4	5	5
8			Tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	1	1	2	2	3	3	4

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

9		Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE	4	4	4	4	4	4	4
10		Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	1	3	3	4	4	4	4
11		Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	1	1	2	3	3	4	4
12		Tingkat kematangan penerapan manajemen layanan SPBE	1	1	2	2	2	3	3
13		Pertumbuhan pengunjung website	424104 viewers	5% ~ 44530 9 dari 42410 4 viewer	5% ~ 4675 75 dari 44530 9 viewer	5% ~ 4909 53 dari 4675 75 informasi	5% ~ 51550 1 dari 49095 3 informasi	5% ~ 54127 6 dari 51550 1 informasi	5% ~ 568340 dari 541276 informasi
14		Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	2.420 informasi	5% ~ 2541 informasi dari 2.420 informasi	5% ~ 2668 informasi dari 2541 informasi	5% ~ 2801 informasi dari 2668 informasi	5% ~ 2941 informasi dari 2801 informasi	5% ~ 3088 informasi dari 2941 informasi	5% ~ 3242 informasi dari 3088 informasi
15		Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	4	4	4	4	4	4	4
16		Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	95 data yang dipublikasikan	100% ~ 100 / 100 data	100% ~ 105 / 105 data	100% ~ 110 / 110 data	100% ~ 115 / 115 data	100% ~ 121 / 121 data	100% ~ 127 / 127 data
17		Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang diintegrasikan	14.28% (1/7 data)	28.57 % (2/7 data)	42.86 % (3/7 data)	57.14 % (4/7 data)	71.43 % (5/7 data)	85.72 % (6/7 data)	100% (7/7 data)

BAB VII P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Gresik yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan kesatuan gerak dan langkah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik di masa mendatang.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya "*Good Governance*".